

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu hubungan Internasional merupakan pengetahuan dengan cangkupan yang luas, di mana hadirnya banyak fenomena dan teori. Salah satu hal yang pasti terjadi dalam hubungan internasional adalah interaksi antara aktor internasional. Kerjasama dan perselisihan merupakan sebuah realitas tak terhindarkan dalam menjalin suatu hubungan. Konflik juga terjadi akibat perubahan diplomasi yang dilakukan suatu negara dalam masyarakat internasional. Negara sendiri mempunyai hak kedaulatan untuk mengatur secara nyata tindakannya, termasuk ideologi dalam menentukan perdamaian. Jepang adalah negara dengan perubahan kebijakan dari segi sistem keamanan dan pertahanan militer. Dimulai dari masa Restorasi Meiji sebelum Perang Dunia I yang awalnya tertutup menjadi kerap kali melakukan invasi kepada negara lain dengan cara militer. Jepang dengan kekuatannya mencoba untuk menjadi negara pemimpin di kawasan Asia (Wijaya, 2006).

Jika melihat secara historis, Jepang pada masa Perang Dunia kedua adalah negara yang reaktif dan agresif dalam invasi atau dapat disebut ekspansionis (Wijaya, 2006). Sikap ekspansionis Jepang yang kerap kali agresif ketika berinteraksi dengan masyarakat internasional membuat Jepang dicap sebagai negara penjajah. Kemudian pada masa akhir perang dunia kedua, dimana Jepang akhirnya dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagashaki. Kekalahan tersebut sangat berdampak kepada masyarakat Jepang sendiri, baik dari segi materi ataupun

psikis. Jepang memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh sikap ekspansionis yang telah dilakukan pada masa perang.

Hal tersebut pun membawa Jepang kepada jurang kemerosotan ekonomi yang mengancam pembangunan Jepang. Sumber daya manusia sulit untuk berkembang pada masa sulit tersebut yang berujung trauma yang dalam kepada perang. Hal itupun menjadi pemantik Jepang untuk sadar bahwa Jepang terlalu bergantung pada kekuatan militer. Kehancuran Jepang menjadi awal mula negara ini menemukan ideologi sikap anti militerisme yang dipercayai dan tersebar di kalangan masyarakat yaitu pasifisme. (Izumikawa, 2010)

Pasifisme merupakan ideologi dalam menolak penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Pasifis merupakan orang yang menganut pasifisme, terutama masyarakat Jepang. Pengikut pasifisme mempercayai bahwa kekerasan dapat memperburuk masalah dan dapat menghasilkan banyak penderitaan. Maka dari itu konflik seharusnya dapat diselesaikan melalui cara dialog, upaya kolaboratif, negosiasi, dan berdamai. Dalam perubahan perubahan kebijakan internasional setelah trauma yang mendalam karena perang, Jepang menciptakan kebijakan baru dengan undang undang perdamaian didalamnya. Tepatnya konstitusi pada pasal sembilan yang membatasi kekuatan militer Jepang, membuat negara mengurangi peran dan kapasitas pengembangan militer dengan dimulainya pasal-pasal menekan mengenai pertahanan (Izumikawa, 2010).

Pasifisme mencakup larangan berpartisipasi dalam perang, kekerasan politik atau penggunaan kekerasan dalam segala situasi. Walaupun tidak ada satu individu yang secara spesifik mencetuskan atau pertama kali menyebutkan istilah

"pasifisme" dalam konteks Jepang pasca perang, beberapa tokoh seperti Douglas MacArthur, Kijūrō Shidehara, dan Shigeru Yoshida memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip pasifisme. Kebijakan ini kemudian dikenal sebagai pasifisme Jepang dan menjadi bagian integral dari identitas nasional Jepang.

Ideologi pasifisme dapat termasuk menolak untuk berperang atau bergabung dengan militer, menolak menggunakan kekerasan dalam protes atau perlawanan politik, dan menolak menggunakan kekerasan untuk membela diri pribadi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pasifisme bukanlah posisi absolut dan terkadang dapat menjadi bahan perdebatan etis dan praktis. Beberapa berpendapat bahwa ada situasi di mana penggunaan kekerasan dapat dibenarkan sebagai bentuk pertahanan diri atau perlindungan yang diperlukan.

Ideologi pasifis Jepang ada pada akhir perang dunia kedua, ketika posisi Jepang kalah. Kalahnya Jepang dengan aliansi pada perang dunia kedua pada bulan Agustus 1945 disebabkan karena kurangnya tenaga atau bisa dibilang karena kekurangan kekuatan militer secara kuantitas dan kualitas. Jika dilihat dalam konstitusi Jepang yang dilaksanakan tahun 1947, konstitusi tersebut dirancang dalam menghilangkan pengaruh militer Jepang agar tidak dapat melakukan pendudukan atau invasi setelah perang dunia kedua. Dalam konstitusi melindungi hak asasi manusia masyarakat Jepang dalam pernyataan yang menyerupai *American Bill of Rights* (Steffoff, 1988). Semenjak konstitusi 1947 tersebut, mereka membangun tentara dengan kuantitas 245.000 pasukan. Akan tetapi pada kenyataannya memiliki peran yang terbatas apabila terjadi invasi. Karena undang-undang

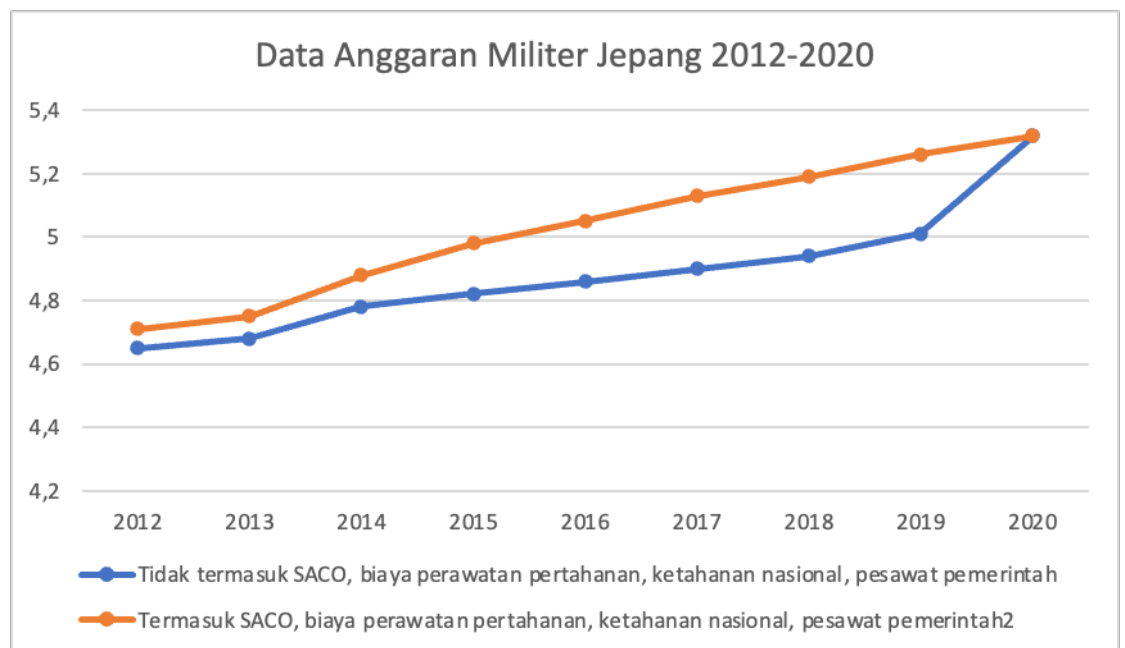
melarang segala aktivitas militer, Jepang tidak mengambil keputusan dalam perang pengembangan nuklir dan hanya penjualan senjata pada negara lain (Steffoff, 1988).

Rakyat Jepang dikekang untuk meninggalkan perang dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dari dampak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antar negara. Maka dari itu terbatas pembatasan pada angkatan darat, laut, serta udara, sebagai sumber dari potensi perang akan diminimalisir secara pengelolaan. Kebijakan tersebut berdampak secara diplomatis pada dimensi opini publik dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri, begitu pula pada masyarakat internasional. Diplomasi publik memiliki arti tersendiri dalam membawa pengaruh dan dapat merubah terhadap laju pertumbuhan suatu negara. Jepang adalah negara pada kawasan Asia Timur pertama yang berhasil dalam membangun proses perkembangan ekonominya sehingga dapat cepat pulih setelah kekalahan Perang Dunia II. Bangkitnya negara Jepang tidak terlupa dari peran pemerintah dengan dukungan dari pemerintah yang terfokus pada sektor ekonomi serta industrialisasi (Beason, 1982).

Jepang sendiri melakukan justifikasi pada tindakannya dalam Pasifisme kepada masyarakat internasional. Namun, secara fakta pada masa pemerintahan Shinzo Abe menyuarakan pentingnya militer sehingga ideologi pasifisme defensif lebih proaktif. Pasifisme proaktif dipercaya sebagai sebuah tindakan yang berlainan arah atau suatu bentuk perilaku menyimpang akan ideologi pasifisme itu sendiri atau dapat dianggap. Perilaku yang mulai timbul menjadikan ideologi Jepang tidak lagi pasifisme akan tetapi pasifisme lebih proaktif yang nantinya akan menjadi sebuah keanehan atau bentuk ancaman terhadap norma atau aturan-aturan yang

disepakati oleh negara Jepang itu sendiri dan kawasan regional dalam Jepang, terkhusus Asia Timur. Pada dasarnya perubahan kebijakan luar negeri, tidak akan dapat berubah tanpa adanya diplomasi dan dilemma didalamnya.

Pada 2012 hingga 2020, mulai dari Shinzo Abe memimpin telah terjadi peningkatan anggaran militer secara signifikan. Christopher Hughes pada karyanya dengan judul “Japan remilitarization” menyatakan bahwa muncul beberapa indikator saat Jepang diberikan label pasifis yang lebih proaktif, salah satu indikator tersebut adalah peningkatan anggaran militer (Hughes, Japans Remilitarisation, 2009).



Gambar 1.1 Data Peningkatan Terhadap Anggaran Militer dari Ministry of Defense di Jepang

Diolah oleh Peneliti:

Sumber: Kementerian Pertahanan Jepang, 2020

Berdasarkan **Gambar 1.1** dari kementerian pertahanan tahun 2020, terlihat bahwasanya peningkatan anggaran pengeluaran untuk militer meningkat di tahun 2017-2020 hingga masa kepemimpinan Shinzo Abe berakhir. Bahkan peningkatan anggaran militer oleh Jepang terjadi sejak tahun 2012 hingga tahun 2020. Terdapat juga beberapa hal yang meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk pembelian dan peningkatan kemampuan militer, pengembangan persenjataan, peningkatan kesiapan pertahanan, dan peran anggaran pertahanan dalam strategi pertahanan Jepang. Grafik tersebut dapat menjadi bukti bahwa negara Jepang sedang melakukan remilitarisasi dengan perubahan struktur militer menjadi lebih proaktif.

Pada masa pemerintahan Shinzo Abe menjadi perdana menteri terdapat tujuan baru dari negara Jepang, yaitu *Japan's new security bills* yang menjadikan pertahanan Jepang memiliki wewenang melakukan invasi luar negeri. Bahkan tujuan Shinzo Abe cukup idealis jika melihat gebrakan yang menjadikan Jepang sejak perang dunia kedua yang tidak pernah memperbolehkan penyelesaian konflik dengan peperangan dikarenakan menyebabkan trauma pada masyarakat Jepang secara keseluruhan (Justin, 2015). Hal tersebut merupakan bukti perubahan langkah perubahan kebijakan pasifisme proaktif dari pemerintahan Shinzo Abe. Para pendukung perubahan kebijakan tersebut beranggapan terdapat potensi ancaman dari China yang semakin lama tidak seimbang dari segi ekonomi ataupun kemiliterannya.

Perubahan kebijakan tersebut dimulai semenjak Shinzo Abe membuat tim khusus untuk mempelajari implikasi pada pasal 9 konstitusi yang mengekang kemiliteran Jepang. Tim tersebut melaporkan pada tanggal 15 Mei 2014

bahwasannya merekomendasikan atau melakukan perubahan kontemplasi pada konstitusi 1947 pasal 9 dengan anggapan memudahkan pergerakan dengan *collective self defense*. Berlanjut dimulai sejak 1 Juli 2014, terjadi negosiasi untuk merubah pandangan Partai Buddha yang memegang prinsip pasifisme dari Partai Demokrat Liberal.

Pada akhirnya saat 16 Juli 2015, DPR Jepang atau majelis rendah yang terdiri dari 480 dewan tersebut menyepakati konstitusi militer karena dipengaruhi oleh PM Shinzo Abe. Tindakan tersebut merupakan loncatan perubahan besar untuk pertahanan Jepang semenjak pasifisme. Konstitusi tersebut memberikan akses pada *Japan Self Defense Force* (JSDF) untuk melakukan *Collective self-defense*. Terciptanya konstitusi tersebut memperluasn peran militernya dalam berkolaborasi dan mengembangkan teknologi, walaupun dalam pengesahan parlemen terjadi beberapa bentrokan pada dewan didalamnya (Min-ji, 2015).

Kebijakan ini menjadi lompatan pasifisme lebih proaktif yang besar pada dampak militeristik negara Jepang karena trauma dari Perang Dunia kedua. Kemudian dimulai sejak September 2015, majelis rendah Jepang yang melakukan pengesahan secara konstitusi dalam merubah kebijakan terkait *Japan's new security bills*. Perubahan konstitusi tersebut menjadikan perluasan militer dapat dilakukan walaupun gejolak dalam politik domestik hingga terjadi ricuh dalam parlemen majelis rendah Jepang (Min-ji, 2015).

Jika dengan kemunculan reinterpretasi konstitusi dari pasal 9 menjadikan pengurangan pembatasan konstitusional kepada pasukan Jepang dalam bertindak di luar negeri atau praktik *Collective Self-Defense* yang menjadikan perubahan arah

kebijakan luar negeri defensif dan citra yang dihasilkan dari proaktif tersebut, bahkan dapat menguntungkan sekutunya yaitu Amerika Serikat walaupun tidak muncul ancaman pada Jepang (McCurry, 2015). Maka dari itu, dilatar belakangi oleh perubahan penyebaran pasifisme menjadi lebih proaktif yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat internasional sehingga menyebabkan permasalahan internal negara dan perubahan strategi dari Jepang dalam membangun citra internasional yang menyebabkan peneliti mengambil penelitian berjudul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Defensif Menjadi Pasifisme Proaktif Periode 2017-2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan meningkatnya anggaran militer dibarengi perubahan kebijakan konstitusi keamanan secara tidak langsung memunculkan sebuah pertanyaan “Bagaimana Jepang melakukan perubahan kebijakan pasifisme defensif menjadi proaktif dengan diplomasi pertahanan walaupun mengalami Security Dilema dalam pemerintahan periode keempat Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2017-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan khusus penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan penyajian mengenai pemahaman dalam langkah diplomasi negara Jepang di tengah struktur kebijakan Jepang yang mulai berubah dan menerima penolakan dalam negeri untuk kemajuan kepentingan nasional keamanan sebuah negara.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan umum penulisan penelitian ini adalah untuk menemukan analisa alasan tentang bagaimana Jepang merubah struktur kebijakan militer dan agenda-agenda reformasi perubahan pergerakan militer di skala internasional, yang dalam penelitian ini adalah agenda Jepang yang berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kebijakan militer di Jepang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam ilmu akademik perihal pengetahuan tentang diplomasi dengan berbagai pengaruh dan efeknya. Tak hanya itu, penelitian yang memberikan perspektif baru terkait diplomasi pertahanan walaupun mengalami security dilemma pada negara Jepang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mohamad Reza Tri Satriakhan pada jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah berjudul “Diplomasi Jepang dan Amerika Serikat dalam Merespon Peningkatan Anggaran Militer China Periode 2006-2010” menyebutkan bahwa peningkatan kerjasama pada negara Jepang dilakukan kepada AS periode 2006-2010 juga memiliki tujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan kedua negara. Sebagai negara yang harus membatasi kekuatan militernya, tantangan yang akan dihadapi Jepang semakin lama semakin menegangkan pada kawasan Asia Timur. Hal ini menyebabkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat sangat dibutuhkan Jepang untuk

meningkatkan kesiapan Jepang untuk menghadapi perkembangan masa depan di sekitar kawasan. Kerjasama pertahanan juga termasuk dalam instrumen bagi Jepang untuk memudahkannya memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan negaranya. Dengan naungan dari negara hegemoni Amerika Serikat, maka Jepang akan lebih mudah menghadapi segala bentuk tekanan pada masa mendatang (Satriakhan, 2015).

Selain itu perubahan citra dengan diplomasi dilakukan Jepang dan AS memiliki tujuan penjagaan kedaulatan keamanan kawasan pada Asia Timur. Apabila terjadinya konflik antara dua negara raksasa Asia Timur, yaitu Jepang dan China, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di kawasan ini. Karena konflik tersebut dapat mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara lain di kawasan ini. Apabila itu terjadi maka baik Jepang maupun China akan dirugikan. Apabila hubungan antar negara di kawasan ini terganggu, maka akan berdampak pada kelangsungan hidup setiap negara. Selain itu, Amerika Serikat juga merupakan pihak yang merasa bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan di dunia karena hegemoni pertahanan. Dengan demikian maka perubahan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat periode 2006-2010 mempunyai tujuan dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

Tak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Arumsari Laksono pada Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, desember 2018 yang memiliki judul “Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif” membahas terkait kebijakan keamanan yang berubah karena kepemimpinan Shinzo

Abe. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Shinzo Abe melakukan fokus tujuan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi serta keamanan Jepang dalam menghindari supremasi dari negara-negara kawasan Asia Timur. Gaya *Incremental* dari kepemimpinan Abe menjadikan kepribadiannya terbuka secara informasi, menghargai konflik yang muncul, dan berfokus dengan ancaman serta memecahkan permasalahan walaupun situasi dilemma Jepang yang tidak memunculkan peluang (Dinda, 2018).

Gaya *situational characteristic* pada Shinzo Abe dipengaruhi dengan faktor sosial serta lingkungan yang menjadikannya pertimbangan. Abe memunculkan berbagai pertimbangan kondisi sekeliling Jepang dan muncul dengan suatu kebijakan. Abe melihat kawasan sekitar Asia Timur dimana muncul kekuatan China yang semakin meningkatkan hegemoninya. Oleh karena itu Jepang berusaha meningkatkan hegemoni dari segi militer atau pasifisme proaktif. Faktor idiosinkratik tersebut yang membuat Abe berpandangan bahwa kebijakan pasifisme yang melekat pada Jepang sejak perang dunia kedua perlu dirubah menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar. Hal itu menyebabkan Abe merubah arah kebijakan dari ideologi Jepang atau segi militer menjadi proaktif. Pada akhirnya Abe melihat perubahan kebijakan sebagai langkah Jepang agar menjadi negara yang lebih kompetitif pada masyarakat internasional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Unggul Waskito dengan judul pada jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014 – 2017” yang

membahas mengenai Jepang yang melakukan pasifis dengan cara proaktif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang menghasilkan dampak yang merunut perubahan stabilitas keamanan pada kawasan negara Asia Pasifik (Waskito, 2018).

Peneliti menarik perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan melihat struktur diplomasi di Jepang dalam gaya kepemimpinan Shinzo Abe. Pembaharuan yang digunakan saat periode keempat Perdana Menteri Shinzo Abe setelah disahkan ratifikasi pasal 9 tahun 2015. Maka dari itu, peneliti memandang militer tidak bisa sepenuhnya dapat digunakan pada konsep melihat kebijakan negeri, maka diperlukan dalam menganalisa kasus perubahan kebijakan menggunakan diplomasi pertahanan di Jepang.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Neorealisme

Penelitian ini menggunakan Teori Neorealisme dengan fokus pada konsep diplomasi pertahanan. Teori neo-realisme merupakan teori yang muncul akibat kegagalan realisme klasik menjelaskan mengapa Perang Dingin bisa sampai terjadi. Berbeda dengan realisme yang berpandangan bahwa negara selalu menginginkan power atau kekuasaan karena sifat dasar manusia, struktural realisme menyatakan bahwa sistem atau struktur internasional yang mendorong negara untuk meningkatkan powernya (Mearsheimer, 2012).

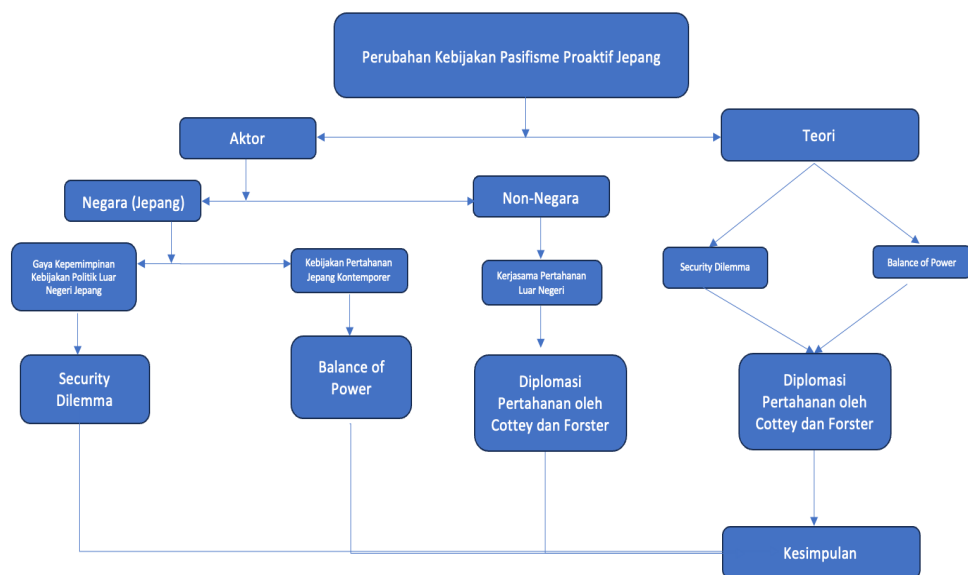
Pada landasan yang sama dengan pendahulunya, neo-realisme juga bersifat pesimis terhadap kerjasama akan tetapi masih ada peluang untuk negara-negara

melakukan kerjasama tergantung tingkat kepentingan akan power suatu negara. Dalam melihat power, realisme dan neo-realisme juga memiliki perbedaan. Realisme menganggap bahwa power merupakan tujuan atau tindakan akhir suatu negara yang harus dicapai. Berbeda dengan neo realisme yang menganggap power sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan negara yaitu terciptanya diplomasi pertahanan (Mearsheimer, 2012)..

Diplomasi pertahanan pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi yang dilakukan oleh aktor yang mempunyai otoritas secara langsung kepada militer, baik dari presiden ataupun kelompok pertahanan. Negara akan mencoba membangun hubungan baik dan rasa saling percaya untuk mencegah konflik militer. Negara juga dapat meningkatkan kapasitas industri mereka dalam mencegah konflik. Melakukan diplomasi pertahanan dapat mengambil pemosisian geopolitik untuk mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial (Andrew Cottey, 2004).

Dalam teori neo realisme dapat digunakan konsep *Security dilemma* yang secara alamiah negara Jepang menggunakan *self help* negaranya sendiri untuk bisa menciptakan rasa aman terhadap dirinya (Herz, 2007). *Self help* merupakan salah satu asumsi dasar dari neorealisme, dimana negara Jepang harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Asumsi mengenai *self help* ini juga beranggapan bahwa kepentingan nasional semua negara sebagai musuh yang dapat menghancurkan negaranya, maka dari itu tercipta dilemma dalam mengembangkan persenjataan militer untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Dalam teori neo realisme dapat digunakan konsep *Security dilemma* untuk mendorong negara Jepang untuk mempersenjatai diri dan membentuk aliansi untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan tunggal yang menjadi terlalu kuat, terutama pada kawasan Asia Timur. Tujuannya adalah untuk mencegah hegemoni dan menjaga stabilitas internasional pada kawasannya agar negara lain tidak dapat mengancam Jepang dalam mengambil kebijakan politik luar negeri (Griffiths, 2002). Maka dari itu dapat ditarik tiga konsep dalam melakukan penelitian perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam ketakutan Jepang atau *security dilemma* dan perimbangan kekuatan atau *balance of power*, kemudian solusi konkrit dari Jepang dalam arena internasional dengan diplomasi pertahanan.



Gambar 1.2 Diagram Alur Penelitian

Diolah dari berbagai sumber:

Sumber: (Andrew Cottey, 2004), (Griffiths, 2002), (Herz, 2007)

Pada **Gambar 1.2** dapat dilihat bahwa Jepang sebagai aktor tentunya memiliki aktor didalamnya yang paling central yaitu pucuk pimpinannya dan akibat dari gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan akan berubah seiring perubahan zaman dan ancaman. Pada masa kontemporer seperti sekarang terdapat *Security Dilemma* dari negara di kawasan Asia Timur seperti China, Korea Utara, dan politik global yang berpengaruh pada tindakan Jepang sebagai negara yang memiliki kepentingan nasional. Kemudian terdapat keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki Jepang karena harus melakukan *Balance of Power* terhadap konflik yang mungkin terjadi. Maka dari itu Jepang menjalankan Diplomasi Pertahanan sebagai solusi yang efektif dalam menanggapi berbagai ancaman.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan merupakan kolaborasi dalam sektor kerjasama militer saat era kontemporer karena militer secara tradisional sudah semakin berkurang dan beralih kepada peningkatan hegemoni. Pada dasarnya diplomasi ini tidak akan bergantung invasi atau operasi dalam militer, akan tetapi dengan adanya kerjasama antara kemiliteran dalam proses diplomasi untuk mencegah konflik, peningkatan kapabilitas militer, perlindungan dengan meningkatkan hegemoni suatu negara. Hal itu dapat dilihat dengan pertukaran anggota militer, kunjungan kemiliteran, pertemuan khusus dari pimpinan militer atau presiden, forum

pertahanan nasional ataupun internasional, serta kegiatan untuk pengembangan persenjataan (Andrew Cottey, 2004).

2. *Balance of Power*

Balance of power adalah keadaan yang dapat menyebabkan ketakutan dalam meningkatkan kapabilitas militer karena akan menimbulkan ancaman pada negara kawasan sekitar. Jika ketakutan terjadi, negara kawasan yang terancam akan mencoba mengimbangi dengan peningkatan kapabilitas militernya (Griffiths, 2002). Negara yang berusaha untuk mengimbangi kekuatan negara kawasan karena terlihat ancaman dapat membentuk koalisi dengan melihat geo-strategis, koalisi tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya ekspansi yang disebabkan negara tetangga dengan memperkuat wilayahnya. Tindakan menciptakan koalisi dapat disebut *containment policy* (Griffiths, 2002).

3. *Security Dilemma*

Security dilemma adalah suatu keadaan negara yang melakukan peningkatan *power*-nya, maka negara tersebut dapat menciptakan interpretasi ancaman untuk perlindungan negara lain (Posen, 1993). Menurut asumsi dari *neorealisme*, dalam sistem dunia yang anarki, setiap negara membutuhkan keamanan. Sehingga setiap negara memiliki berbagai instrumen kekuatan, seperti militer, serta alutsista yang memadai. Hal ini bertujuan agar negara dapat tetap merasa aman dan siap menghadapi berbagai macam ancaman dan serangan dari luar.

1.6.2 Definisi Operasional

1. Diplomasi Pertahanan

Jika melihat dari perspektif neo realisme bahwa diplomasi pertahanan adalah instrumen kerjasama pertahanan dalam mendapatkan kepentingan nasional negara serta terbagi menjadi diplomasi bilateral dan multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan dapat menentukan sikap pertahanan serta keamanan suatu negara. Ketiga, dapat mempengaruhi kerjasama baik dalam mempengaruhi ketegangan dalam tatanan masyarakat internasional. Kesuksesan strategi pertahanan tersebut dapat dilihat dalam tingkat domestik, regional, serta global. Berikut merupakan 3 tahapan dalam diplomasi pertahanan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan *Defense diplomacy for Confidence Building Measures(CBM)*, *Defense Diplomacy for defense capabilities*, *Defense Diplomacy for Defense Industry* (Syawfi, 2009).

Confidence Building Measures yang bertujuan untuk melihat Jepang meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpercayaan antara negara-negara, terutama di kawasan yang rawan konflik. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. *Defense Capabilities* dengan tujuan negara Jepang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan melalui kerja sama dengan negara lain dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan pertukaran teknologi. *Defense Industry* dilakukan agar Jepang mengembangkan dan memperkuat industri pertahanan domestik melalui kolaborasi internasional, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi. Pada akhirnya Jepang dapat menjadi negara mandiri dalam militer

Sebagaimana dengan penjabaran diatas maka penelitian dengan judul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Defensif Menjadi Pasifisme Proaktif Periode 2017-2020” dapat dianalisa menggunakan konsep diplomasi Pertahanan. Diplomasi pertahanan yang digunakan dalam konsep *Defense diplomacy for Confidence Building Measures, Defense Diplomacy for defense capabilities, Defense Diplomacy for Defense industry*. Merupakan langkah strategis Jepang dalam mencegah ancaman negara China dalam kebijakan perubahan arah diplomasi dari pasifisme menjadi pasifisme proaktif. Negara yang dapat mencegah tersebut selaku aliansi Jepang adalah Amerika sejak 1951, akan tetapi seiring perkembangan politik luar negeri masa kontemporer sudah banyak negara lain yang dapat dilibatkan dalam kerjasama pertahanan.

2. Balance Of Power

Balance of power memiliki dua jenis yang pertama merupakan konsep pembentukan aliansi untuk penyeimbangan kekuatan, hal itu dapat dilihat ketika masa damai setelah perang dunia keduanya terbagi menjadi dua poros yaitu barat maupun timur. Kedua merupakan penyeimbangan dengan melakukan penyesuaian kapabilitas militer suatu negara dengan negara lain. *Balance of power* jenis kedua dapat dilihat dari Amerika Serikat dan Uni Soviet saling meningkatkan kapasitas militernya dalam saling memberikan hegeomi terkuat dalam tatanan global ketika masa damai tersebut (Griffiths, 2002).

Sebagaimana dengan penjabaran diatas maka penelitian dengan judul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Defensif Menjadi

Pasifisme Proaktif Periode 2017-2020” akan dianalisis dengan konsep *balance of power*. Konsep tersebut menjelaskan ketika kawasan Asia Timur meningkatkan penggunaan militernya, maka Jepang akan berupaya mengimbangi power yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Power tersebut berupa peningkatan diplomasi dengan AS. Maka dari itu konsep *balance of power* digunakan untuk bisa memahami proses perimbangan kekuatan antara aliansi Jepang-Amerika Serikat dengan kawasan Asia Timur.

3. Security Dilemma

Security dilemma merupakan sebuah paradigma yang terjadi pada negara dengan pengambilan keputusan tetapi bingung atau terjadi dilema dalam mencapai kepentingan nasionalnya dikarenakan hegemoni negara lain. Terdapat dua level dalam security dilemma yaitu *dilemma of interpretation* serta *dilemma of response* (Booth, 2008). *Dilemma of interpretation* merupakan pandangan tentang negara lain, dapat dilihat pada interpretasinya mengenai motif, maksud dan tujuan dari perilaku negara lain (Griffiths, 2002). Kemudian *dilemma of response* merupakan respon dari negara tersebut ketika melihat negara lain yang dalam posisi terancam secara kepentingan nasional (Griffiths, 2002).

Sebagaimana dengan penjabaran diatas maka penelitian dengan judul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Defensif Menjadi Pasifisme Proaktif Periode 2017-2020” akan dianalisis dengan konsep *security dilemma*. Dilema ini semakin diperkuat dengan adanya isu yang mengatakan bahwa Amerika Serikat berkeinginan untuk menyudahi atau memberhentikan aliannya

dengan Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsep security dilemma ini digunakan untuk bisa memahami dilema keamanan yang dirasakan Jepang terhadap Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang dari Pasifisme Defensif Menjadi Proaktif Periode 2017-2020.

1.7 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwasanya perubahan diplomasi dilakukan oleh Jepang disebabkan oleh pasifisme defensif ke pasifisme proaktif karena telah disahkan perubahan konstitusi 9. Terdapat berbagai ancaman dalam kawasan Asia Timur, terutama China dengan anggaran militer yang semakin tinggi, kemudian Korea Utara dengan percobaan nuklir serta rudal antar benua, dan konstelasi politik global yang merugikan hegemoni Jepang. Maka dari itu perlunya Jepang bekerjasama militer oleh berbagai negara, pada akhirnya Jepang dapat keluar dari Pasifisme dan menjadi militer secara sepenuhnya.

1.8 Metode Penelitian

Metode dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tidak melibatkan pengukuran dan statistik serta lebih menekankan pada analisa dan esensi dari suatu fenomena. Cara kerja pendekatan kualitatif disebut dengan metode Fenomenologis, yaitu metode dalam menganalisa serta mendapatkan kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi (Boeree, 2005). Metode kualitatif pada hakekatnya dapat memberikan penjelasan yang bersifat *explanative*.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini bersifat *explanative* dalam menjabarkan kejadian tersebut dapat terjadi. Penelitian *explanative* nantinya dapat menjabarkan sesuatu kejadian yang diperoleh dari data serta informasi yang beredar secara valid (Hunt, 1988). Ketika penggunaan pendekatan *explanative*, peneliti akan mengetahui tahapan diplomasi yang dilakukan oleh negara Jepang dalam perubahan kebijakan luar negeri dari pasifisme kepada pasifisme proaktif.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini menggunakan *desk research* dengan situs resmi yang terdapat pada negara Jepang. Peneliti menggunakan metode ini yang berarti akan dilakukan dari tempat domisili yaitu Semarang. Peneliti dapat mencari data pendukung melalui situs penelitian di Jepang. Walaupun nantinya peneliti tidak akan melakukan teknik pengumpulan data di Jepang, peneliti melakukan pengumpulan data secara lengkap serta akurat dengan jurnal yang berada pada internet dan mengkaitkan data valid terhadap relevansi penelitian. Dengan begitu, maka walaupun dilakukan di tempat tinggal peneliti tetap dapat melakukan penelitian berdasarkan data-data serta bukti-bukti yang sesuai dan akurat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian merupakan negara Jepang dalam melakukan pasifisme defensif lebih proaktif dalam kebijakan pertahanan. Peneliti secara

khusus melihat pada periode keempat Shinzo Abe dalam kurun rentang waktu sejak tahun 2017-2020 terkait tahapan berdiplomasi yang dilakukan oleh negara Jepang.

1.8.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai artikel, jurnal, serta buku, serta pidato dari aktor negara terkait yang relevan dalam penggambaran kejadian yang sedang terjadi. Data terkait akan menjadi dasar penjelasan perihal analisa serta argumen dari peneliti untuk mendapatkan kesimpulan.

1.8.5 Sumber Data

Peneliti melakukan pengumpulan dalam data primer maupun sekunder. Data primer akan diperoleh penulis dari aktor yang terlibat dan situs resmi dari pemerintah terkait. Kemudian data sekunder akan diperoleh dari sumber yang beredar di internet seperti jurnal atau berita pada berbagai media (Ajayi, 2017). Data tersebut dapat dipergunakan untuk mempermudah analisa serta mendapatkan kesimpulan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik *desk research*. Dengan melakukan teknik *desk research* maka peneliti dapat melakukan penelitian tanpa harus terjun langsung ke dalam tempat terjadinya fenomena yang diteliti. Terdapat 2 cara yang dapat dilakukan yakni *library research* dan *internet research*. Teknik pengumpulan data

library research berarti peneliti akan mengumpulkan data-data berupa jurnal-jurnal atau artikel melalui perpustakaan. Sedangkan *internet research* merupakan teknik pengumpulan data seperti jurnal, artikel, berita ataupun sumber-sumber lainnya yang mendukung melalui media internet.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis data adalah sebuah teknik yang mengubah data-data dan variabel-variabel untuk menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik kongruen, pada akhirnya diambil kesimpulan dengan mencoba menghubungkan menggunakan pertanyaan beserta penelitiannya. Teknik kongruen pada umumnya dikatakan sebagai pendekatan sebangun (Rosyidin, 2020). Peneliti menggunakan pendekatan yang fokus dalam melihat fenomena sebab-akibat dari setiap kejadian. Maka dari itu, peneliti akan mencari variabel yang dapat menguatkan pembuktian dalam hasil analisa beserta kesimpulan sebagai landasan dalam berfikir.

1.8.8 Kualitas Data

Peneliti nantinya mengolah data serta informasi dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Nantinya peneliti dapat mengambil informasi-informasi pada jurnal internasional dengan memanfaatkan platform *free access* yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Diponegoro pada fitur SIAP. Peneliti juga dapat mengamati media berita baik internasional ataupun lokal serta dapat mencari informasi-informasi lainnya melalui internet.